Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 2, Agustus 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, menetapkan bahwa Jurnal HAM mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Pembina	:	Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penanggung Jawab	:	Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pengarah	:	1. Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Pemimpin Umum/Redaksi (*Chief Editor*)	:	Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M. (Penn State Dickinson Law, United States)
Anggota Dewan Redaksi (*Editorial Board*)	:	1. Dr. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) 2. Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 3. Firdaus S.Sos., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 4. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 5. Oki Wahju Budijanto, S.E., S.H., M.M. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 6. Donny Michael Situmorang, S.H., M.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 7. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 8. Sabrina Nadilla, S.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 9. Ganesh Cintika Putri, S.I.P, M.HRL. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM)
Editor Pelaksana (*Managing Editor*)	:	Fitriyani, S.H., M.Si. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM)

Asisten Editor (*Assisstant Editor*)	:	1. B. Lora Christyanti, S.I.P., M.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 3. Lindung Budi Mulyawan, S.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 4. Amirah Balqis, S.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 5. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 6. Mira Sukmawati, S.I.P. (Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM) 7. Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Teknologi dan Sistem Informasi	:	1. Haddryson, S.H., M.H. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Andi Rarung, S.H., M.H. 4. Agus Priyatna, S.Kom. 5. Fadillah Said, S.Kom. 6. Harysandy Permana, S.Kom. 7. Adi Octaviantara, A.Md. 8. Tegar Christopher Yolanda, S.I.P. 9. Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Alamat Redaksi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Gedung Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimile (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan
PT Pohon Cahaya
Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440
Telepon: 081391694388

Catatan:

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritisi serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dikirim melalui Open Journal System (OJS) pada laman ejournal.balitbangham.go.id.

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 2, Agustus 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
PENGANTAR REDAKSI v

Persetujuan Dinamis sebagai Sarana Optimalisasi Pelindungan Data Pribadi dan Hak atas Privasi
(*The Dynamic Consent for Optimizing Personal Data Protection and The Right to Privacy*) 105-122
Masitoh Indriani, Annida Aqiila Putri

Makna Menjadi Aktivis Gerakan Hak-Hak Disabilitas di Bali: Studi Fenomenologis tentang Pengalaman Aktivis Gerakan Sosial
(*The Meaning of Being an Activist of the Disability Rights Movement in Bali: A Phenomenological Study of the Experiences of Social Movement Activists*) 123-136
I Made Anom Wiranata

Konstitusionalisasi Pelindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam
(*Constitutionalization of Consumer Protection in the Perspective of Human Rights Law and Islamic Prophetic Law*) 137-154
Musataklima, M. Syamsudin, Adi Sulistiyono

Hambatan Hukum untuk Penikmatan Hak atas Pekerjaan bagi Pekerja dengan Disabilitas
(*A Legal Barrier to the Enjoyment of the Right to Work for Workers with Disabilities*) 155-168
Ayunita Nur Rohanawati, Sahid Hadi, Taufiqurrahman

Karakteristik Penggusuran di Indonesia: Pentingnya Intervensi HAM Sebelum, Sewaktu, dan Setelah Penggusuran
(*Characteristics of Eviction Practice in Indonesia: The Importance of Human Rights Intervention Before, During and After Evictions*) 169-184
Mochamad Felani Budi Hartanto, Dian Andi Nur Aziz, Agus Suntoro

Aksesibilitas Terhadap Informasi Keagamaan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu: Visualisasi Tanda di Lingkungan Pusdai Jawa Barat
(*Accessibility to Religious Information for Persons with Hard of Hearing (HOH): Visualization of Signs in the West Java Islamic Da'wah Center*) 185-204
Inna Junaenah, Hendy Hermawan, Samodro, Dante Rigmalia

BIODATA PENULIS xv

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 2, Agustus 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi kedua yaitu Jurnal HAM Volume 14 Nomor 2, Agustus 2023. Edisi ini, memuat 6 (enam) karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti. Diawali oleh tulisan terkait persetujuan dinamis sebagai sarana optimalisasi pelindungan data pribadi dan hak atas privasi. Tulisan kedua ditulis untuk memaknai menjadi aktivis Gerakan hak-hak disabilitas di Bali dengan mengangkat fenomena tentang pengalaman aktivis Gerakan sosial. Tulisan berikutnya mengulas tentang konstitusionalisasi perlindungan konsumen dari perspektif hukum hak asasi manusia dan hukum profetik Islam. Selanjutnya hambatan hukum penikmatan hak atas pekerjaan bagi pekerja dengan disabilitas dikupas tuntas. Tulisan kelima membahas pentingnya intervensi hak asasi manusia sebelum, sewaktu, dan setelah penggusuran dengan menilik karakteristik penggusuran di Indonesia. Tulisan terakhir menganalisis aksesibilitas terhadap informasi keagamaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu dengan melihat visualisasi tanda di lingkungan Pusdai Jawa Barat. Keenam tulisan tersebut menjelaskan secara kritis tentang isu-isu terkait dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan Open Jurnal System maupun dari sisi materi tulisan.

Selamat Membaca
-Dewan Redaksi-

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 2, Agustus 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

DEWAN REDAKSI JURNAL HAM MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN

1. Professor Hadi Strømmen Lile
   Department of Welfare, Management and Organisation, Østfold University College, Norwegia
2. Dr. Annie Bekker
   Department of Mechanical and Mechatronic Engineering, Stellenbosch University, South Africa
3. Dr. Azhari Yahya, SH., MCI, M.A
   Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Indonesia
4. Dr. Ferry Darmawan, S.Sos., M.Ds.
   Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Indonesia
5. Yulia Indrawati Sari, ST., M.Sc., MPP., Ph.D
   Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia
6. Antoni Tsaputra, S.S., MA., Ph.D.
   Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia
7. Muhammad Bahrul Ulum, S.H., LL.M.
   Queensland Technology University, Australia
8. Eko Riyadi, M.H.
   Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia
9. Rianda Dirkareshza, S.H., M.H.
   Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia
10. Nicken Sarwo Rini, SH., MH.
    Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia
11. Nurrahman Aji Sutomo, SH., MH.
    Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 2, Agustus 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Masitoh Indriani, Annida Aqiila Putri (*Department of International Law, Faculty of Law, Airlangga University & Utrecht Law School, The Netherlands*)

(The Dynamic Consent for Optimizing Personal Data Protection and The Right to Privacy)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 2, August 2023, page 105-122

Consent is one of the foundations for data processing in the Operation of Electronic Systems by government and private institutions. Implementing consent as a basis for data processing has several shortcomings, particularly as it primarily relies on individuals being aware of providing authentic consent. In practice, individuals often give consent without considering any terms and conditions. Consent obtained without knowledge of data processing can jeopardize the right to privacy and the protection of personal data. This paper examines dynamic consent as a means to optimize the protection of privacy rights. The findings indicate that the concept of dynamic consent that prioritizes its approach to Data Subjects serves as a means to optimize personal data protection. Dynamic consent can strike a balance between, on the one hand, the simplicity of the consent mechanism, and, on the other hand, the personal data protection standards and the right to privacy. Formulating dynamic consent should be based on legal elements, societal practices, technological features, and the involvement of personal data protection authorities. Additionally, as a form of implementing accountability for Electronic System Organizers as data controllers or processors, an effective mechanism for resolving personal data disputes is needed. These elements, when combined, can provide optimal personal data protection.

Keywords: consent; dynamic consent; personal data protection; right to privacy

I Made Anom Wiranata (*Faculty of Sosial and Political Science, Udayana University*)

(The Meaning of Being an Activist of the Disability Rights Movement in Bali: A Phenomenological Study of the Experiences of Social Movement Activists)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 2, August 2023, page 123-136

The disability rights movement is exercised by movement actors who are able to transform their experiences of suffering into power to bring about changes toward the fulfillment of the rights of persons with disabilities. This research discusses the relationship between the reconstruction of past experiences of grievances due to stigma and discrimination, collective identity, and the capacity to be involved in the disability rights movement. By taking a location in Bali, this research uses a qualitative-phenomenology methodology to reveal the meaning of the experiences of the subjects who are disability rights movement activists, in the process of involving themselves in social movements. This article finds that the social movement actors are able to reconstruct their suffering into the capacity to make changes. Their personal identity meets their collective identity as actors in the disability rights movement through interaction with the community which provides space for the emergence of new awareness about rights and advocacy strategies. The UNCRPD ratification, socialized by civil society organizations, opened up opportunities for strengthening interactions and networks between disability rights activists at the national and local levels. This network has strengthened the confidence of activists in Bali to take collective action. The ratification of the UNCRPD is also a momentum for mobilizing movement resources to change the old frame of charity towards a new frame of the fulfilment of rights. Changing the framework was carried out by advocating Regional Regulations in Bali which are in line with the spirit of the UNCRPD. Besides that, activists through their daily activities, show the public that persons with disabilities can be independent and actualize their potential if they get the chance.

Keywords: discrimination; disability; identity; social movement; UNCRPD

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 2, Agustus 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Musataklima, M. Syamsudin, Adi Sulistiyono (*Faculty of Sharia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Faculty of Law, Indonesian Islamic University (UII) Yogyakarta, Indonesia; Faculty of Law, Sebelas Maret State University (UNS) Surakarta, Indonesia*)

(Constitutionalization of Consumer Protection in the Perspective of Human Rights Law and Islamic Prophetic Law)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 2, August 2023, page 137-154

People are ipso facto consumers. People, as consumers, have rights that must be protected by law. As human beings, consumers have rights that must be protected, respected, fulfilled, and advanced by the state. However, the current consumer protection in Indonesia is still weak and ineffective as evidenced by many consumer complaints to the National Consumer Protection Agency (BPKN). This is also due to the weak legal instruments of consumer protection that need to be incorporated into the country's constitution. The study aims to analyze the urgency of constitutionalizing consumer protection from the perspective of human rights and prophetic Islamic law. This study finds that (1) constitutionalization of consumer protection from a human rights perspective can guarantee the fulfillment of the right to life as a fundamental human right and can act as an instrumentation of the fulfillment of right to decent and safe standard of living, and (2) from the perspective of prophetic law, the constitutionalization of consumer protection can empower public authorities to fulfill, respect, implement, and enforce consumer protection, thus humanizing and liberating consumers from unfair and fraudulent trade.

Keywords: constitutionalization; consumer protection; human rights law; islamic; prophetic law

Ayunita Nur Rohanawati, Sahid Hadi, Taufiqurrahman (*Faculty of Law of the Islamic University of Indonesia; Centre of Studies for Law and Constitution (PSHK) Faculty of Law of the Islamic University of Indonesia*)

(A Legal Barrier to the Enjoyment of the Right to Work for Workers with Disabilities)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 2, August 2023, page 155-168

This article focuses on the enjoyment of the right to work for workers with disabilities. This focus is driven by the fact that there are still many discriminatory practices for workers with disabilities in the workplace. This study identifies, for instance, a worker with sensory and physical disabilities that is assigned to a not accessible field of work. This assignment presents barriers faced by the worker and results in the termination of the worker's employment. Based on this fact, this article addresses two research questions. What is the legal barrier to the enjoyment of the right to work for workers with disabilities? What adequate interventions should the state take to ensure equality and non-discrimination for workers with disabilities? This normative study answers these two questions by analyzing the norms of Law No. 13/2003 on Manpower with the component of legal barrier in the social model for disability. This study proves that the provision in the Manpower Law is categorized as a legal barrier to the enjoyment of the right to work for workers with disabilities. Therefore, this study encourages the state's legislative function to complement the provisions of the Law with a substance that requires every employers to ensure that their business governance is inclusive and accessible to the diversity of workers with disabilities based on equal rights.

Keywords: legal barrier; manpower; workers with disabilities; right to work; social model

Jurnal HAM
Volume 14 Nomor 2, Agustus 2023
p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Mochamad Felani Budi Hartanto, Dian Andi Nur Aziz, Agus Suntoro (*Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional; Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional*)

(Characteristics of Eviction Practice in Indonesia: The Importance of Human Rights Intervention Before, During and After Evictions)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 2, August 2023, page 169-184

Development and spatial planning policies, especially physical infrastructure, are closely tied to the changes in land use. When these policies intersect with public living spaces, there is a possibility that they are leading to eviction. Although driven by public interest considerations—such as infrastructure development, post-disaster relocation and reconstruction, river flow normalization--evictions in Indonesia often coincide with conflicts, violence, lack of information, and inadequate compensation. These eviction practices are closely associated with alleged human rights violations. This article aims to critically examine the normative aspects of eviction policies and practices in Indonesia from a human rights perspective. It also raises the idea of human rights intervention in eviction policies and practices, aiming at establishing an ideal balance between spatial planning needs and human rights protection for displaced communities. By juxtaposing eviction policies and practices in Indonesia with human rights instruments related to evictions, this kind of intervention is necessary in within three time frames of eviction, namely before, during, and after evictions. Within these temporalities, the government should consider all alternatives outside evictions, provide clear information including eviction procedures, ensure protection for affected communities, and ensure reparative efforts for impacted communities.

Keywords: ***eviction; human rights; development policies***

Inna Junaenah, Hendy Hermawan, Samodro, Dante Rigmalia (*Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Program Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Ahmad Dahlan; Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia*)

(Accessibility to Religious Information for Persons with Hard of Hearing (HOH): Visualization of Signs in the West Java Islamic Da'wah Center)

Jurnal HAM, Volume 14, Number 2, August 2023, page 185-204

Human rights law encourages the implementation of state obligations by enacting policies that remove accessibility barriers for persons with disabilities, including a guaranteed access to information. Unfortunately, attention and efforts to facilitate the accessibility of people with deaf disabilities are insufficient, especially regarding religious information. The West Java Islamic Da'wah Center (Pusat Dakwah Islam/Pusdai), as one of the social service units within the local government, barely has a systematic policy basis to facilitate access to religious information, particularly for the "Friday Sermon" for persons with Hard of Hearing (HOH). This article identifies that human rights law can be the underlying basis for the fulfilment of visual communication for persons with HOH. This article discusses a visual design construction that may facilitate communication barriers for deaf-disabled persons in accessing religious information in Pusdai. By employing a socio-legal approach, including visual communication design lens, this study finds a gap in the visual information availability and facility for people with HOH. This study contends that visualization, in the form of moving and static signs, is necessary to facilitate the convenience of persons with HOH and it is seen as an effort to realize inclusive religious services. Such a measure needs to be incorporated into the National Action Plan on Human Rights (RANHAM) in West Java Province.

Keywords: ***accessibility to information; persons with hard of hearing (HOH); visualization of signs***

p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kata Kunci bersumber dari Artikel.
Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Masitoh Indriani, Annida Aqiila Putri (Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga & Utrecht Law School, The Netherlands)

Persetujuan Dinamis sebagai Sarana Optimalisasi Pelindungan Data Pribadi dan Hak atas Privasi

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2023, hal. 105-122

Persetujuan (consent) merupakan salah satu dasar pemrosesan data dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh institusi pemerintah dan sektor swasta. Implementasi pemberian persetujuan sebagai dasar pemrosesan data memiliki berbagai kekurangan, terutama pada tingginya ketergantungan terhadap kesadaran individu dalam mewujudkan persetujuan yang sah. Dalam praktiknya, individu kerap memberikan persetujuan tanpa memedulikan syarat dan ketentuan di dalamnya. Persetujuan yang diberikan tanpa pengetahuan akan informasi tentang pemrosesan data dapat mengancam hak atas privasi dan pelindungan data pribadi seseorang. Tulisan ini melakukan analisis tentang persetujuan dinamis sebagai sarana untuk mengoptimalkan pelindungan hak atas privasi. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa konsep persetujuan dinamis yang mengutamakan pendekatan terhadap Subjek Data hadir sebagai sarana optimalisasi pelindungan data pribadi. Persetujuan dinamis dapat menyeimbangkan antara kemudahan mekanisme persetujuan dengan tetap menjunjung tinggi standar pelindungan data pribadi dan hak atas privasi. Formulasi persetujuan dinamis didasarkan pada unsur hukum, praktik masyarakat, fitur teknologi serta keterlibatan otoritas pelindungan data pribadi. Selain itu, dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa data pribadi yang efektif sebagai bentuk implementasi akuntabilitas bagi Penyelenggara Sistem Elektronik sebagai Pengendali atau Prosesor Data Pribadi. Gabungan dari elemen-elemen tersebut dapat menghasilkan pelindungan data pribadi yang optimal.

Kata Kunci: persetujuan; persetujuan dinamis; pelindungan data pribadi; hak atas privasi

I Made Anom Wiranata (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana)

Makna Menjadi Aktivis Gerakan Hak-Hak Disabilitas di Bali: Studi Fenomenologis tentang Pengalaman Aktivis Gerakan Sosial

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2023, hal. 123-136

Gerakan penyandang disabilitas dimotori oleh aktor-aktor gerakan yang mampu mentransformasi pengalaman negatif mereka menjadi daya untuk mewujudkan perubahan ke arah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Riset ini membahas tentang relasi antara rekonstruksi atas pengalaman negatif di masa lalu akibat stigma dan diskriminasi, identitas kolektif, dan kapasitas untuk terlibat dalam gerakan hak-hak disabilitas. Dengan mengambil lokasi di Bali, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif jenis fenomenologi untuk mengungkap makna pengalaman dari tujuh narasumber aktivis gerakan hak disabilitas dalam proses pelibatan diri mereka dalam gerakan sosial. Artikel ini menemukan bahwa narasumber aktor gerakan sosial mampu merekonstruksi pengalaman negatif mereka menjadi kapasitas untuk membuat perubahan. Identitas personal mereka bertemu dengan identitas kolektif sebagai pelaku gerakan hak-hak disabilitas melalui interaksi dengan komunitas yang memberikan ruang bagi munculnya kesadaran baru tentang hak dan strategi advokasi. Ratifikasi UNCRPD yang disosialisasikan oleh organisasi masyarakat sipil membuka kesempatan bagi penguatan interaksi dan jaringan antara aktivis hak-hak disabilitas di tingkat nasional dan di tingkat lokal. Jejaring tersebut menguatkan kepercayaan diri para aktivis di Bali untuk membuat aksi kolektif. Ratifikasi UNCRPD juga menjadi momentum bagi mobilisasi sumber daya gerakan untuk mengubah bingkai lama belas kasihan menuju bingkai baru pemenuhan hak. Pengubahan bingkai tersebut dilakukan melalui advokasi pada pembentukan Peraturan Daerah di Bali yang selaras dengan semangat UNCRPD. Di samping itu, para aktivis melalui kegiatan keseharian, menunjukkan kepada publik bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk mandiri dan mengaktualisasikan potensinya jika mereka mendapatkan kesempatan.

Kata Kunci: diskriminasi; disabilitas; identitas; gerakan sosial; UNCRPD

p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Kata Kunci bersumber dari Artikel.
Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Musataklima, M. Syamsudin, Adi Sulistiyono (Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia; Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Indonesia)

Konstitusionalisasi Pelindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2023, hal. 137-154

Manusia, warganegara ipso facto konsumen. Manusia sebagai konsumen memiliki hak yang harus dilindungi oleh hukum. Konsumen sebagai manusia memiliki hak asasi yang harus dilindungi, dihormati, dipenuhi dan dimajukan oleh negara. Namun pelindungan konsumen saat ini belum efektif dan lemah, buktinya banyak pengaduan konsumen pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Ini juga disebabkan oleh instrumen hukum pelindungan konsumen yang lemah sehingga perlu pengakaran dalam konstitusi negara. Berdasarkan hal ini, bertujuan penelitian untuk menganalisis urgensi konstitusionalisasi pelindungan konsumen perspektif hak asasi manusia dan hukum profetik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui studi pustaka dan penelusuran secara online (internet searching), surfing dan dowloading, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini meliputi: (1) konstitusionalisasi pelindungan konsumen perspektif hak asasi manusia dapat menjamin terpenuhinya hak untuk hidup sebagai hak dasar manusia, dan dapat menjadi instrumentasi atas pemenuhan hak atas standar hidup yang layak; dan (2) dalam perspektif hukum profetik, konstitusionalisasi pelindungan konsumen dapat memberdayakan otoritas publik dalam pemenuhan, penghormatan, pelaksanaan dan penegakan pelindungan konsumen, sehingga mewujudkan humanisasi dan liberasi konsumen dari perdagangan yang tidak adil dan curang.

Kata Kunci: konstitusionalisasi; hukum hak asasi manusia; hukum profetik; Islam; pelindungan konsumen

Ayunita Nur Rohanawati, Sahid Hadi, Taufiqurrahman (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

Hambatan Hukum untuk Penikmatan Hak atas Pekerjaan bagi Pekerja dengan Disabilitas

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2023, hal. 155-168

Artikel ini berfokus pada penikmatan hak atas pekerjaan bagi pekerja dengan disabilitas. Fokus ini dilatarbelakangi oleh fakta perihal perlakuan diskriminatif bagi pekerja dengan disabilitas di tempat kerja. Studi ini mengidentifikasi, misalnya, seorang pekerja dengan disabilitas sensorik dan fisik justru ditempatkan di bidang kerja yang tidak aksesibel untuk ragam disabilitasnya. Penempatan ini menghadirkan hambatan baginya dan berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap sang pekerja. Berdasarkan kondisi faktual tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama, apa hambatan hukum dalam penikmatan hak atas pekerjaan bagi pekerja dengan disabilitas? Kedua, intervensi memadai apa yang dapat dilakukan negara guna menjaminan kesetaraan dan perlakuan non-diskriminasi bagi pekerja dengan disabilitas? Studi normatif ini menjawab dua rumusan masalah tersebut dengan cara menganalisis norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan komponen hambatan hukum dalam model sosial untuk disabilitas. Studi ini membuktikan bahwa ketentuan di dalam UU Ketenagakerjaan masih menjadi hambatan hukum dalam penikmatan hak atas pekerjaan bagi pekerja dengan disabilitas di tempat kerjanya. Maka itu, studi ini mendorong fungsi legislasi negara untuk melengkapi ketentuan UU Ketenagakerjaan, yang substansinya mengatur pemberi kerja untuk memastikan tata kelola bisnisnya inklusif dan aksesibel bagi keragaman pekerja dengan disabilitas berdasarkan kesetaraan hak.

Kata Kunci: hak atas pekerjaan; hambatan hukum; ketenagakerjaan; model sosial; pekerja dengan disabilitas

p-ISSN 1693-8704
e-ISSN 2579-8553
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Mochamad Felani Budi Hartanto, Dian Andi Nur Aziz, Agus Suntoro (Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional; Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Karakteristik Penggusuran di Indonesia: Pentingnya Intervensi HAM Sebelum, Sewaktu, dan Setelah Penggusuran

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2023, hal. 169-184

Kebijakan pembangunan dan tata ruang terutama infrastruktur fisik tidak terlepas dari perubahan fungsi lahan. Apabila dihadapkan pada ruang kehidupan publik, maka kebijakan ini akan berpotensi terjadi penggusuran. Meskipun dilatarbelakangi oleh alasan kepentingan publik—seperti pembangunan infrastruktur, relokasi dan rekonstruksi pascabencana, normalisasi aliran sungai—penggusuran di Indonesia sering disertai konflik, kekerasan, minim informasi, hingga proses ganti rugi yang tidak layak. Praktik penggusuran inilah yang berdekatan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara kritis aspek normatif dalam kebijakan dan praktik penggusuran di Indonesia dalam perspektif HAM. Artikel ini juga memunculkan gagasan intervensi HAM dalam aktivitas penggusuran agar tercipta kondisi ideal antara kebutuhan penataan ruang dan perlindungan HAM bagi masyarakat tergusur. Dengan menyandingkan kebijakan dan praktik penggusuran di Indonesia dengan instrumen-instrumen HAM terkait, studi ini menemukan bahwa intervensi HAM diperlukan dalam kebijakan dan praktik penggusuran. Sebagai pemangku kewajiban, negara memiliki kewajiban HAM dalam tiga termin waktu, yakni: sebelum, sewaktu, dan pascapenggusuran. Dalam setiap aspek temporalitas tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan semua alternatif selain pelaksanaan penggusuran, memberikan informasi yang jelas termasuk prosedur penggusuran dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak, serta memastikan upaya pemulihan terhadap masyarakat terdampak.

Kata Kunci: penggusuran; hak asasi manusia; kebijakan pembangunan

Kata Kunci bersumber dari Artikel.
Lembar Abstrak ini Disalin Tanpa Izin dan Biaya

Inna Junaenah, Hendy Hermawan, Samodro, Dante Rigmalia (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran; Program Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Ahmad Dahlan; Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia)

Aksesibilitas Terhadap Informasi Keagamaan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu: Visualisasi Tanda di Lingkungan Pusdai Jawa Barat

Jurnal HAM, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2023, hal. 185-204

Hukum hak asasi manusia (HAM) mendorong pelaksanaan kewajiban negara dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang dapat menghapus kendala aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas, di antaranya jaminan akses terhadap informasi. Sayangnya, perhatian dan upaya terhadap kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas tuna rungu masih terbatas, terlebih lagi mengenai informasi keagamaan. Secara praktis, di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat sebagai salah satu unit layanan sosial di lingkungan Pemerintah Provinsi juga belum terdapat landasan kebijakan sistematis untuk memfasilitasi akses informasi keagamaan, terutama ketika "Khutbah Jumat" bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Artikel ini berisi identifikasi bahwa kontribusi hukum HAM melandasi kemungkinan pemenuhan komunikasi visual bagi penyandang disabilitas tuna rungu. Artikel ini juga membahas tentang konstruksi suatu desain visual yang dimungkinkan untuk memfasilitasi kendala komunikasi dalam mengakses informasi keagamaan bagi jamaah disabilitas tuna rungu di Pusdai Jawa Barat. Dengan pendekatan socio-legal termasuk dari desain komunikasi visual (DKV), terdapat analisis kesenjangan atas ketersediaan dan kemudahan informasi visual bagi penyandang disabilitas tuna rungu ketika mengakses fasilitas tempat ibadah di Pusdai Jawa Barat. Dari kesenjangan yang dianalisis, direkomendasikan visualisasi berupa tanda bergerak dan tanda statis untuk memfasilitasi kemudahan penyandang disabilitas tuna rungu sebagai upaya mewujudkan inklusi pelayanan keagamaan. Substansinya dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan pengadaan fasilitas informasi untuk jamaah, sebagai salah satu program dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Provinsi Jawa Barat di tahun 2021-2025.

Kata Kunci: aksesibilitas informasi; disabilitas tuna rungu; visualisasi tanda; informasi keagamaan